

**IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI NOMOR 05
TAHUN 2015 TENTANG PENERTIBAN TERNAK
LEPAS DI NAGARI IV KOTO HILIE KECAMATAN
BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS
UNP sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**YOSHI INDRAYANI
TM/NIM : 2015/15042163**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Nagari No.05 Tahun 2015
Tentang Penertiban Ternak Lepas Di Kenagarian IV Koto
Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Yoshi Indrayani

Nim/FM : 15042163/2015

Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Mei 2019

Disetujui oleh:
Pembimbing



Dr. Hasbullah Malau S.Sos, M.Si
1975071520080 11012

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2019 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

**Implementasi Peraturan Nagari No.05 Tahun 2015 Tentang Penertiban
Ternak Lepas Di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama : Yoshi Indrayani
Nim : 15042163
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

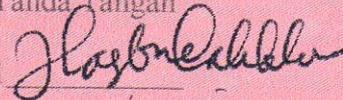
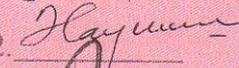
Padang, 16 Mei 2019

Tim Penguji

Nama

1. Ketua : Dr. Hasbullah Malau S.Sos,M.Si
2. Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
3. Anggota : Drs. Syamsir M.Si, Ph.D

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Mengetahui
Dekan FIS UNP




Dr. Syamsir Anwar, M. Pd
198903 1 002

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoshi Indrayani

Nim/TM : 15042163/ 2015

Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Kuok/ 26 November 1998

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Nagari No.05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas Di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Yoshi Indrayani

15042163/2015

KATA PENGANTAR

Tiada untaian kata yang lebih indah selain ucapan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir akademis pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negari Padang.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan cahaya kebenaran dan petunjuk umat manusia dengan akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban ke arah yang lebih baik, serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia dan taat hingga akhir zaman. Karena berkat perjuangan beliaulah sampai detik ini kita masih dapat menikmati manisnya Iman dan Islam.

Dengan melalui proses yang banyak rintangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan”. Hal ini tidak lepas dari peranan dan dorongan orang – orang sekitar penulis hingga selesainya skripsi ini. sudilah kiranya penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada yang tercinta dan kasih. Tiada ungkapan yang pantas diberikan saat ini terimakasih yang sangat dalam kepada :

Ayahanda Drs. Elyani Hanafi, M.A curahan kasih dan sayang yang begitu dalam membuat penulis dapat merasakan kekuatan cinta hingga kini, Tak Lupa Ibunda terkasih Indrawati, A.Md yang memberikan belaian kasih yang lembut dan hangat dengan untaian kata nan indah kepada penulis sehingga penulis bisa bersemangat dalam pembuatan skripsi ini.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Pembimbing Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si yang telah membimbing penulis hingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Penguji I Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si dan Bapak Penguji II Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D yang telah memberi saran dan masukan kepada penulis sehingga penulis mampu menyempurnakan skripsi ini.
3. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D.
4. Dosen Pembimbing Akademik Penulis Nora Eka Putri S.IP, M.Si yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
5. Sekretaris Nagari IV Koto Hilie Lasdi Prasasti, SH yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data skripsi ini.
6. Saudara ku Wilyan Pratama S.T dan Ipar Esa Pratiwi Ningsih yang otw A.Md yang selalu bertanya mengenai kelengkapan data dan waktu wisuda.
7. Saudara ku Arryan Dahyat A.Md yang otw S.T dan Ipar Viola Rizki Ananda S.KG yang otw DRG yang telah memberi Support berupa sindiran halus nan indah.

8. Motivator yang selalu siap mendengarkan keluh kesah dan sabar menghadapi beratnya iklim mahasiswi semester akhir dalam pembuatan skripsi ini Isfan Fauzi.S.T. terkasih.
9. Mariani, Widya Dwi Gempita Sobat Cerewet ku yang sedang berjuang demi Sarjana serta Nadya Nulhusni yang Otw S.Pd.
10. Sahabat-sahabat Karib ku Suci Asfarina, Farhaya Berlian Noviafni dan Dina Syahfitri yang sama-sama berjuang demi S.AP
11. Dan teman IAN 15 Seperti Ella, Mbak Sriwahyuni dan teman-teman tempat curahan pertanyaan penulis ketika bingung dalam pembuatan skripsi yang tak mungkin penulis tuliskan satu persatu.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangsuhnya kepada penulis hingga selesainya skripsi penulis. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

Penulis amat menyadari bahwa masih banyak kekurangan skripsi ini yang perlu disepurnakan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Padang, Mei 2019

Penulis

ABSTRACT

This research is motivated by released cattles problem which has not yet ended, and it has become a huge problem to solve by Kenagarian IV Koto Hilie. This can be seen from many realeased cattles in this kenagarian. The amount of realeased cattles are 85 which distrups traffic, agriculture and other public places.

This study aims to determine and obtain description abaout implementation of Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan aauthor also description abaouto stacles factors and efforts in dealing with the obstacles they face in implementation of the Pernag. This research is a descriptive research with qualitative naturalistic approach. The data used in this research sourced from primary and secondary data. Techniques used in data collection are interview and documentation. The informants in this study are choosen by purposive sampling. Validity checks with sourceand method triangulation. Analyzing data techniques are obtained through interviews and interpreted qualitatively throught abstract, words and statements.

The result of this study indicates that the implementation of Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan does no work optimallly. Implementation has 6 (six) indicators which is communication , resources, disposition, bureaucratic structure, consistency and clarity of purpose also socio-economic and technological condition of the community. Based on authors research result on implementation of Pernag there are found obstacle factors which is communication, resources, disposition, bureucratic structure and socio-economic condition of the community.

Keywords : *Implementation, Peraturan Nagari, Penertiban Ternak Lepas*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan ternak lepas yang berkeliaran yang tak kunjung selesai dan menjadi masalah serius yang harus ditanggulangi di Kenagarian IV Koto Hilie. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah ternak yang berkeliaran di kenagarian ini. Jumlah ternak yang berkeliaran yaitu mencapai 85 ekor dimana hal tersebut sangat mengganggu lalu lintas, pertanian, dan kebersihan tempat-tempat umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Serta peneliti juga mengemukakan faktor penghambat dan upaya dalam menghadapi hambatan dalam Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling dan. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif, berupa abstrak, kata-kata dan pernyataan.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan belum berjalan secara maksimal. Implmentasi memiliki 6 indikator yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi, Konsistensi dan kejelasan tujuan dan Kondisi Sosio-Ekonomi dan Teknologi masyarakat. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan pada Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan faktor penghambat implementasi Pernag ini ialah komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur organisasi, dan kondisi sosio-ekonomi dan teknologi masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Nagari, Penertiban Ternak Lepas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
2.1. Kebijakan Publik	14
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik	14
2.1.2 Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik	16
2.2 Konsep Implementasi	18
2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan	18
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	21
2.3 Pemerintah Nagari	29
2.4 Konsep Adat Minangkabau mengenai Hewan Ternak.....	31
2.5 Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie	33
2.6 Penelitian yang Relevan	36
2.7 Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian	42
3.3 Fokus Penelitian	42
3.4 Informan Penelitian	44
3.5 Jenis dan Sumber data	45
3.5.1 Jenis Data	45
3.5.2 Sumber Data	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.7 Teknik Keabsahan Data	48
3.8 Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Temuan Umum Penelitian	51
4.1.1 Gambaran Umum Kenagarian IV Koto Hilie	51
4.1.2 Gambaran Umum Kantor Wali Nagari IV Koto Hilie	54
4.1.3 Gambaran Umum FKPM Kenagarian IV Koto Hilie	64
4.2 Temuan Khusus Penelitian	66

4.2.1 Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas Di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	66
4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas Di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.....	89
4.2.3 Upaya dalam Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas Di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	95
4.3 Pembahasan	96
4.3.1 Implementasi Peratuan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	96
4.3.2 Faktor-faktor Penghambat Implementasi Peratuan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	104
4.3.3 Upaya dalam Menghadapi Hambatan dalam Implementasi Peratuan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	108
BAB V PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tahap-tahap Penyuluhan Penertiban Ternak Lepas	4
Tabel 1.2 Jumlah ternak lepas	10
Tabel 3.1 Informan Penelitian	45
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Nagari IV Koto Hilie	54
Tabel 4.2 Daftar susunan Pengurus FKPM Kenagarian IV Koto Hilie	65
Tabel 4.3 Tahap-tahap penyuluhan penertiban ternak lepas	71
Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat yang Buta Huruf	88
Tabel 4.5 Jumlah ternak lepas	96
Tabel 4.6 Tahap-tahap Penyuluhan Penertiban Ternak Lepas	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ternak lepas yang berkeliaran di jalan raya	6
Gambar 1.2 Sapi berkeliaran dimalam hari dan memakan tanaman warga	8
Gambar 1.3 Kambing yang beristirahat di warung milik masyarakat	9
Gambar 1.4 Ternak lepas di area Pasar Batang Kapas	9
Gambar 4.1 Kantor Wali Nagari IV Koto Hilie	55
Gambar 4.2 Ternak yang berkeliaran	67
Gambar 4.3 Ternak berkeliaran di kampung Koto Tuo	68
Gambar 4.4 Ternak yang berkeliaran di pasar	69
Gambar 4.5 Sapi yang berkeliaran pada malam hari	70
Gambar 4.6 Sosialisasi dan himbauan Pemerintah nagari terkait ternak lepas	71
Gambar 4.7 RAPBNag Kenagarian IV Koto Hilie Tahun 2019	78

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Peternakan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memiliki peranan cukup penting dalam memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara ini. Sub sektor peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam menyediakan pangan hewani berupa daging, susu, serta telur yang bernilai gizi tinggi. Sub sektor peternakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya peternak, serta memperluas kesempatan kerja. Salah satu komoditi peternakan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein adalah daging. Kebutuhan masyarakat terhadap daging seperti halnya produk ternak lainnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Karena banyaknya kebutuhan masyarakat akan daging, maka banyak masyarakat berternak sapi, kerbau, kambing dan ayam sebagai sumber pendapatan.

Berternak merupakan salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan hidup, selain itu beternak bagi masyarakat merupakan pekerjaan sampingan atau sambilan selain bertani dan berladang, tujuan mereka beternak pada dasarnya sebagai penanaman modal, karena dengan membeli dan memelihara ternak mereka dapat menjual kembali ternak mereka yang kemudian memberi keuntungan optimal bagi pemilik ternak. Selain itu beternak juga berguna pada hari lebaran Haji atau hari Raya Idul Adha (Hari raya Qurban), dimana pada

lebaran Haji pada umumnya para pemilik ternak akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari hari biasanya atau ada juga para peternak yang ikut menyumbang untuk perayaan Hari Raya Korban tersebut.

Peternakan idealnya memerlukan kandang yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi ternak, bagian terpenting dari keberadaan kandang ialah terlindungnya ternak dari hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, hama pemangsa dan pengganggu bagi ternak. Menurut Sihombing dalam Lestari (2013), kandang harus cukup jauh jaraknya dari pemukiman, minimal 250 meter. Semakin dekat jarak rumah dengan peternakan, maka semakin terasa juga dampaknya, dan dipengaruhi juga dengan banyaknya jumlah ternak.

Namun sebagian daerah di Indonesia seperti Sumatera Barat yang sebagian wilayahnya masih cenderung untuk melepaskan begitu saja hewan-hewan ternak mereka baik itu di lingkungan masyarakat, di jalan-jalan raya dan di tempat-tempat umum lainnya. Hewan-hewan yang biasa dijadikan ternak, yang dibiarkan berkeliaran bebas ialah ayam, kambing, itik/bebek dan sapi. Hewan-hewan tersebut biasanya dibiarkan bebas berkeliaran tanpa diikat atau dikandangkan.

Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki budaya yang disebut Budaya Minangkabau memang cenderung melepaskan hewan ternak mereka. Hal ini dapat dilihat dari pepatah minangkabau *anam bulan barajo kalangik anam bulan barajo kabumi* yang bermakna bahwa masyarakat yang memiliki ternak akan mengandangkan ternaknya pada enam bulan pertama, dengan maksud mempersiapkan tanah dan rumput dan enam bulan berikutnya

melepaskan ternak begitu saja karena sumber makanan hewan ternak sudah tersedia. Namun di pesisir selatan, Khususnya di Kenagarian IV Koto Hilie, masyarakat pemilik ternak selalu melepaskan ternaknya.

Hasil wawancara penulis dengan Lindo sebagai Pengurus Kantor Kerapatan Adat Nagari ialah:

“kebudayaan yang ada di IV Koto Hilie tidak ada yang menjelaskan mengenai cara beternak, namun pada dahulunya, masyarakat biasanya melepaskan ternaknya di lapangan terbuka, tetapi masih mengikatnya dan pada malam hari akan di masukan ke kandangnys kembali. Biasanya masyarakat dalam beradat hanya menggunakan *Raso jo pareso* dimana pemilik ternak akan berpikir untuk tidak melepaskan ternaknya sembarangan karena akan mengganggu petani dan masyarakat lain”.

Dari keterangan lindo, bahwa budaya masyarakat IV Koto Hilie sebelumnya tidak mengatur bagaimana cara beternak, namun dalam berkehidupan masyarakat menggunakan *raso jo pareso* yang menuntun masyarakat bertindak. Penulis kemudian mewawancarai langsung salah satu pemilik ternak yaitu Ujang, ujang mengatakan:

“ia sengaja melepaskan sapi yang ia miliki agar ia tidak perlu mencari rumput untuk makanan sapiya salain itu, untuk mencari rumput sebagai makanan sapi pun susah, karena rumput sekarang sudah di perjual belikan dengan harga dua puluh lima ribu perkarungnya sehingga dari pada membayar untuk rumput lagi, lebih baik melepaskan sapi berkeliaran untuk mencari makannya sendiri”.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan PERDA No 04 Tahun 2006 Tentang Penertiban dan Penindakan Perbuatan Maksiat dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang kemudian diperbarui dengan PERDA Pesisir Selatan No 1 Tahun 2016 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada pasal 13 poin (8) yang berbunyi “ setiap orang atau badan dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan ternak disepanjang jalur

hijau, taman dan tempat umum”. Kemudian Kenagarian IV Koto Hilie yang terletak di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan PERNAG No 05 Tahun 2015 tentang Penertiban Ternak Lepas.

Pemerintah Nagari telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat IV Koto Hilie, sosialisasi yang di lakukan pemeritah kenagarian melalui masjid, mushollah, surau dan pada pertemuan-pertemuan lain baik secara lisan maupun menempelkan pengumuman di tempat-tempat. Namun masyarakat terkesan seperti tidak tau mengenai keberadaan PERNAG tersebut. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah nagari telah terlaksana sebanyak 2 tahap dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Tahap-tahap Penyuluhan Penertiban Ternak Lepas

NO	PENYULUHAN	TANGGAL	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1	Tahap I	05 Desember 2015	120 Orang	
2	Tahap II	20 Januari 2016	20 Orang	

Sumber: Dokumentasi Kantor Wali Nagari IV Koto Hilie

Menurut sekretaris nagari IV Koto Hilie Lasdi Prasasti,S.H ialah:

“salah satu penyebab masih banyaknya hewan ternak berkeliaran di kenagarian ini ialah kurangnya peran aparat penegak aturan dalam menangani hal tersebut padahal di kenagarian IV Koto Hilie ini sudah ada Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) sebagai badan hukum nagari yang berperan untuk mengawasi dan menindak lanjuti permasalahan-permasalahan di nagari IV Koto Hilie”.

Pemilik hewan ternak yang berkeliaran di kenagarian IV Koto Hilie merupakan tokoh masyarakat, orang kaya dan keluarga dari aparat penegak peraturan sehingga aparat belum bisa bekerja secara profesional. Selain itu

terdapat indikasi kurangnya partisipasi masyarakat Kenagarian IV Koto Hilie dalam menegakkan peraturan Nagari tersebut.

Indikasi diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Reza (2016) dalam penelitiannya “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala”. Ia menemukan implementasi kebijakan penertiban ternak di Kecamatan Banawa masih belum maksimum. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yaitu: 1) Sasaran dan tujuan kebijakan penertiban ternak sudah jelas. 2) Sumber daya implementator kebijakan masih belum baik. 3) Aktivitas implementasi Kebijakan penertiban ternak masih belum baik. 4) Karakteristik implementator kebijakan penertiban ternak masih belum baik. 5) Ekonomi, Sosial dan Kondisi Politis Masyarakat dalam kebijakan penertiban ternak sudah baik. 6) Disposisi implementator kebijakan penertiban ternak masih belum baik.

Implementasi Pernag ini tentu saja diharapkan dapat berjalan sesuai semestinya mengingat dampak yang di timbulkan oleh ternak yang di biarkan lepas. Keberadaan ternak lepas dapat mengganggu dalam beberapa aspek. Aspek pertama, apabila hewan ternak di biarkan lepas maka akan mengganggu lalu lintas, hal ini berlaku apabila hewan ternak tersebut berkeliaran di dekat jalan raya, dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1.
Ternak Lepas yang berkeliaran di jalan raya



Sumber: Dokumentasi Lapangan

Dari gambar 1.1 dapat dilihat ternak berupa sapi berkeliaran di jalan raya, hal tersebut menyebabkan pengendara harus berhati-hati dalam melintas, jika tidak akibatnya akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Ada banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh pengendara baik sepeda motor maupun mobil menabrak hewan ternak, tentu saja hal tersebut sangat berbahaya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Okma Sandra (2019) yang menemukan bahwa:

“kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kabupaten Pesisir Selatan sepanjang tahun 2017 berjumlah 277 kasus, 40 kasus yang terjadi diantaranya disebabkan oleh gangguan ternak lepas ke jalan raya”.

Banyak nya ternak yang berkeliaran di jalan raya tentu saja sangat mengganggu, dalam beberapa kasus yang penulis amati, hewan ternak berupa sapi sering berkeliaran pada tengah malam, hal ini sangat berbahaya apalagi pada saat malam pengendara cenderung mengantuk. Penulis mengamati apabila terjadi kecelakaan antara pengendara motor dengan hewan ternak seperti sapi dan kambing, dimana kondisi yang disebabkan yaitu pengendara dalam keadaan terluka dan ternak dalam keadaan tidak terjadi apa-apa, maka pemilik ternak tidak bertanggung

jawab atas kecelakaan tersebut, namun jika kondisi sebaliknya, maka pemilik ternak menuntut kematian ternak mereka bahkan bisa mencapai tiga kali lipat harga normal ternak tersebut. Tentu saja hal tersebut tidak menguntungkan bagi pengguna jalan raya.

Selanjutnya, hewan ternak yang di biarkan lepas dapat merusak pertanian. Banyak warga yang mengeluh khususnya petani akibat ternak yang di biarkan lepas oleh pemiliknya memakan tanaman petani. Hewan ternak tersebut masuk ke lahan pertanian petani. Akibatnya petani sering melakukan tindakan berupa pemukulan dengan menggunakan batu bahkan sampai menggunakan senjata tajam seperti sabit, dari wawancara penulis dengan salah seorang warga kenagarian IV Koto Hilie yaitu wati mengatakan

“saat ini sangat susah untuk menanam tumbuhan seperti sayur-sayuran di pekarangan rumah, karna kambing sering masuk dan mengakibatkan tumbuhan mati, tidak hanya sayuran kambing juga sering memakan bunga di pekarangan rumah”

Biasanya jika terjadi seperti itu, Wati hanya mengusir kambing-kambing tersebut dengan batu. Jika kambing dan sapi tersebut masuk ke pekarangan pada saat pagi sampai sore, maka hal tersebut masih bisa diusir oleh masyarakat, namun ternak yang berkeliaran pada malam harilah yang sangat merugikan karna diluar pengawasan masyarakat karna masyarakat sedang tertidur. Berikut penulis menemukan adanya sapi yang diberkeliaran pada malam hari (dapat dilihat pada gambar 1.2)

Gambar 1.2.

Sapi berkeliaran di malam hari dan memakan tanaman warga



Sumber: Dokumentasi lapangan

Hewan ternak yang di biarkan berkeliaran juga membuat lingkungan tempat-tempat umum seperti pasar, jalan raya dan tempat umum lainnya menjadi kotor karena kotoran hewan ternak dan hewan ternak yang dibiarkan lepas tersebut dapat merusak pagar – pagar rumah milik warga. Dari pengamatan langsung yang penulis lakukan, penulis menemukan hewan ternak seperti kambing sering beristirahat di warung milik masyarakat (dapat dilihat pada gambar 1.3) hal ini tentu saja mengganggu pemilik warung karna kambing – kambing tersebut dapat merusak serta mengotori warung yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Gambar 1.3.
Kambing yang beristirahat di warung milik masyarakat



Sumber: Dokumentasi lapangan

Gambar 1.4.
Ternak Lepas di area Pasar Batang Kapas



Sumber: Dokumentasi Lapangan

Dari dokumentasi di atas, dapat diketahui masih banyaknya hewan ternak lepas berkeliaran di Kenagarian IV Koto Hilie. Keberadaan hewan ternak lepas seperti kambing dan sapi yang banyak di kenagarian ini sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu sering dipicu oleh hewan ternak yang secara tiba-tiba menyeberang jalan. Selain itu, para petani juga sering mengeluh dengan keberadaan hewan ternak lepas ini dimana pada musim bertanam padi, hewan ternak lepas tersebut sering memakan padi petani. Dari data yang diperkirakan

pemerintah Nagari IV Koto Hilie terdapat 85 ekor ternak lepas yang berkeliaran di Nagari IV Koto Hilie dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah Ternak Lepas

NO	NAMA KAMPUNG	TERNAK LEPAS		
		SAPI	KAMBING	Jumlah
1	Pasar Kuok	5 ekor	7 ekor	12 ekor
2	Koto Tuo	5 ekor	10 ekor	15 ekor
3	Limau Sundai	8 ekor	8 ekor	16 ekor
4	Bukit Tambun Tulang	7 ekor	7 ekor	14 ekor
5	Jalamu	7 ekor	5 ekor	12 ekor
6	Taluak Batuang	8 ekor	8 ekor	16 ekor
Jumlah		40 ekor	52 ekor	85 ekor

Sumber: dokumen Kantor Wali Nagari IV Koto Hilie

Keberadaan hewan ternak lepas ini sangat mengganggu dimana kenagarian IV Koto Hilie tersebut merupakan pusat dari Kecamatan Batang Kapas sehingga di Kenagarian tersebut terdapat pasar dan kantor – kantor pemerintahan. Padahal di dalam peraturan nagari tersebut sudah di jelaskan sanksi bagi masyarakat yang masih membiarkan ternaknya berkeliaran di jalan dan tempat umum. Sanksi nya pun sudah tegas dari pemerintah nagari berupa penangkapan dan penahanan hewan ternak, dan jika pemilik ternak ingin mengambil ternak nya akan di kenai sejumlah biaya. Apabila pemilik ternak tidak mengambil dalam waktu 15 hari maka hewan ternak tersebut akan dilelang.

Oleh sebab itu timbul pertanyaan bagaimana implementasi PERNAG tersebut? Apa faktor yang mempengaruhinya? Serta bagaimana upaya dalam pengimplementasiannya? Dari uraian pertanyaan tersebut maka pneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Nagari IV Koto Hilie Kecamatan**

Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan”. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yaitu:

1. Masih banyak hewan ternak seperti sapi dan kambing berkeliaran di tempat umum di kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
2. Terdapat indikasi kurangnya peran aparat penegak aturan dalam mengakan PERNAG tersebut.
3. Pola berternak masyarakat di kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat masih menggunakan sistem pemeliharaan yang tradisional, dimana pemeliharaan hewan ternak masih diumbar/dilepaskan.
4. Dari hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, kurangnya peran aparat penegak peraturan nagari.
5. Terdapat indikasi kurangnya partisipasi masyarakat Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dalam menegakkan peraturan Nagari tersebut.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Nagari IV Koto Hilie Nomor 05 Tahun 2015 tentang penertiban ternak lepas dalam wilayah IV Koto Hilie?
2. Apakah hambatan yang di temui dalam implementasi peraturan Nagari IV Koto Hilie Nomor 05 Tahun 2015 tentang penertiban ternak lepas dalam wilayah IV Koto Hilie?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam implementasian peraturan Nagari IV Koto Hilie Nomor 05 Tahun 2015 tentang penertiban ternak lepas dalam wilayah IV Koto Hilie?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Nagari IV Koto Hilie Nomor 05 Tahun 2015 tentang penertiban ternak lepas dalam wilayah IV Koto Hilie.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam implementasi peraturan Nagari IV Koto Hilie Nomor 05 Tahun 2015 tentang penertiban ternak lepas dalam wilayah IV Koto Hilie.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam implementasian peraturan Nagari IV Koto Hilie Nomor 05 Tahun 2015 tentang penertiban ternak lepas dalam wilayah IV Koto Hilie

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian yang sejenis dan pengembangan pengetahuan dan keilmuan terkait Ilmu Administrasi Negara khususnya Kebijakan publik dan Sistem Pemerintahan daerah.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini ialah:

- 1) Bagi Pemerintah penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan masukan yang positif dalam pembenahan dan peningkatan implementasi kebijakan penertiban ternak lepas dalam wilayah IV Koto Hilie.
- 2) Bagi masyarakat dapat memberikan gambaran terhadap pemecahan masalah mengenai penertiban ternak lepas.